

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan pada hakikatnya dibangun oleh seluruh komponen sistem pendidikan, termasuk pengawas sekolah, memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam memastikan proses pendidikan berjalan secara bermutu dan berkeadilan. Pengawas sekolah memegang peranan yang sangat strategis karena memiliki tanggung jawab moral sekaligus profesional dalam memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berlangsung secara efektif, efisien, bermutu, dan berkeadilan.

Secara filosofis, peran pengawas sekolah tidak lagi dipahami sebatas sebagai pengendali administratif dan penilai kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sebagai *learning partner* yang berfungsi mendampingi satuan pendidikan dalam proses peningkatan mutu berkelanjutan. Paradigma ini sejalan dengan pandangan konstruktivistik dan humanistik yang menempatkan guru dan sekolah sebagai subjek pengembangan, bukan objek pengawasan semata. Peran pengawas sebagai pendamping mencerminkan pergeseran dari pendekatan kontrol menuju pendekatan pemberdayaan dan pembinaan profesional.

Dari aspek yuridis, peran pengawas sekolah memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pengendalian mutu pendidikan dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan pembinaan berkelanjutan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan. Fungsional Pengawas Sekolah menekankan fungsi pengawas sebagai pembina profesional guru dan kepala sekolah. Kebijakan Merdeka Belajar juga menuntut pengawas untuk berperan aktif sebagai fasilitator peningkatan mutu satuan pendidikan melalui pendampingan reflektif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan sekolah.

Dengan demikian, secara filosofis dan yuridis, peran pengawas sekolah adalah sebagai pendamping satuan pendidikan yang merupakan suatu keniscayaan dalam menjawab

tantangan peningkatan kualitas pendidikan dasar di era perubahan kebijakan dan kompleksitas kebutuhan sekolah (Mulyanto, Saadah, Suparman, & Firmansyah, 2023: 21).

Mutu pendidikan merupakan konsep multidimensional yang mencakup mutu input, proses, output, dan outcome pendidikan. Secara teoretis, mutu pendidikan dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah, kompetensi guru, budaya mutu, sistem supervisi akademik, serta dukungan pemangku kepentingan. Sekolah dasar sebagai jenjang pendidikan fundamental menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan mutu pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan.

Secara empiris, kualitas pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi berbagai permasalahan. Indikator seperti hasil asesmen nasional, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, kualitas perencanaan pembelajaran, serta implementasi pembelajaran berdiferensiasi menunjukkan capaian yang belum optimal. Selain itu, masih ditemukan keterbatasan dalam pemanfaatan hasil supervisi dan pendampingan sebagai dasar perbaikan mutu pembelajaran dan manajemen sekolah.

Tabel 1.1 Kondisi kualitas pendidikan di Kab.Tasikmalaya

No	Aspek yang Dikaji	Indikator	Data Empirik	Sumber Data	Makna bagi Kualitas Pendidikan SD
1	Akses/Partisipasi Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun	98,63% (target 80,11%)	LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024; Rapor Pendidikan 2024	Menunjukkan akses pendidikan dasar sangat tinggi dan hampir seluruh anak usia wajib belajar terlayani

No	Aspek yang Dikaji	Indikator	Data Empirik	Sumber Data	Makna bagi Kualitas Pendidikan SD
2	Ketersediaan Satuan Pendidikan	Jumlah SD/ sederajat	1.293 sekolah (tersebar di 39 kecamatan)	Data Referensi Kemendikdasmen	Menggambarkan daya dukung layanan pendidikan dasar yang memadai dari sisi kuantitas satuan pendidikan
3	Sebaran Sekolah per Kecamatan	Contoh: Cipatujah (57), Karangnunggal (55), Cikalong (56), dll.	Relatif merata di tiap kecamatan	Data Referensi Kemendikdasmen	Mendukung pemerataan akses pendidikan dasar hingga wilayah kecamatan
4	Implikasi terhadap Mutu	Akses vs kualitas	Akses tinggi, kualitas perlu penguatan indikator mutu pembelajaran	Analisis peneliti berbasis LKIP	Menunjukkan bahwa capaian akses perlu diimbangi peningkatan mutu pembelajaran (literasi, numerasi, iklim belajar, rasio guru, sarpras)

Berdasarkan Tabel 1, kondisi kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Tasikmalaya dari sisi akses dan ketersediaan layanan menunjukkan capaian yang relatif baik. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun mencapai 98,63%, melampaui target 80,11%, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh anak usia wajib belajar telah terlayani oleh sistem pendidikan dasar. Capaian ini diperkuat oleh ketersediaan satuan pendidikan yang memadai, yaitu sebanyak 1.293 sekolah dasar dan sederajat yang tersebar di 39 kecamatan. Sebaran sekolah yang relatif merata di tiap kecamatan menunjukkan adanya pemerataan akses pendidikan dasar secara geografis, sehingga hambatan jarak dan wilayah terhadap layanan pendidikan dapat diminimalkan.

Namun, capaian akses yang tinggi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan. Data empirik dan analisis berbasis LKIP menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah sangat baik, kualitas pembelajaran masih memerlukan penguatan. Hal ini tercermin dari perlunya peningkatan indikator mutu seperti literasi, numerasi, iklim belajar yang kondusif, rasio guru terhadap siswa, serta ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran. Dengan demikian, fokus kebijakan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya ke depan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan akses dan pemerataan, tetapi juga pada upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran agar capaian pendidikan dasar benar-benar berdampak pada peningkatan kompetensi dan karakter peserta didik.

Kondisi geografis, disparitas sumber daya pendidikan, serta keterbatasan kapasitas profesional guru dan kepala sekolah turut berkontribusi terhadap rendahnya mutu pendidikan. Dalam konteks ini, peran pengawas sekolah menjadi sangat strategis sebagai aktor yang menjembatani kebijakan dengan praktik di satuan pendidikan. Namun, apabila peran pengawas belum mampu mendorong perubahan signifikan di tingkat sekolah, maka permasalahan mutu akan terus berulang dan bersifat struktural.

Peran strategis pengawas sekolah semakin penting ketika sekolah menghadapi perubahan kebijakan yang cepat dan kompleks. Implementasi kurikulum, penerapan asesmen nasional, penguatan literasi dan numerasi, integrasi teknologi dalam pembelajaran, hingga pengembangan karakter peserta didik memerlukan dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan. Pengawas sekolah tidak hanya bertugas melakukan penilaian terhadap kinerja sekolah, tetapi juga memberikan konsultasi, fasilitasi, dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi guru maupun kepala sekolah. Dengan demikian, pengawas berperan sebagai mitra profesional yang membantu sekolah melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Namun demikian, efektivitas peran pengawas sekolah sangat bergantung pada kualitas kompetensi dan pola kerja yang diterapkan. Apabila pengawasan hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan pelaporan tanpa disertai pendampingan yang substantif, maka dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan akan sangat terbatas. Pengawas yang kurang aktif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas guru maupun kepala sekolah cenderung tidak mampu menciptakan perubahan yang berarti pada praktik pembelajaran dan tata kelola sekolah. Kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan pendidikan terus berulang dari waktu ke waktu tanpa adanya penyelesaian yang mendasar.

Ketika peran pengawas belum mampu mendorong perubahan signifikan di tingkat sekolah, berbagai persoalan mutu pendidikan berpotensi menjadi masalah yang bersifat struktural. Rendahnya kompetensi guru, lemahnya kepemimpinan sekolah, kurang optimalnya pengelolaan sumber daya, serta rendahnya capaian belajar peserta didik dapat terus berlangsung dan mengakar dalam sistem pendidikan. Situasi tersebut tidak hanya menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional, tetapi juga memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan antarsatuan pendidikan.

Oleh karena itu, penguatan peran pengawas sekolah perlu menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Pengawas perlu dibekali dengan kompetensi profesional yang relevan, kemampuan supervisi yang efektif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pembinaan dan pendampingan. Pendekatan pengawasan yang kolaboratif, reflektif, dan berkelanjutan akan memungkinkan pengawas sekolah berfungsi secara optimal sebagai agen perubahan yang mampu mendorong transformasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, berbagai tantangan yang dihadapi sekolah dapat direspons secara lebih tepat sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat diwujudkan secara berkelanjutan dan merata.

Rendahnya mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tasikmalaya menuntut adanya strategi pembinaan yang lebih efektif, salah satunya melalui peran pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. Pendampingan profesional merupakan pendekatan yang efektif dalam pengembangan mutu pendidikan karena bersifat kolaboratif, kontekstual, dan berkelanjutan. Pendampingan memungkinkan pengawas sekolah untuk berperan sebagai *coach* dan *mentor* yang membantu guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan praktik, mengidentifikasi permasalahan, serta merancang solusi peningkatan mutu berbasis data dan kebutuhan nyata sekolah.

Namun, secara empiris, peran pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan belum sepenuhnya berjalan optimal. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pengawas masih terjebak dalam pola supervisi administratif dan evaluatif yang bersifat formalistik. Keterbatasan jumlah pengawas, beban kerja yang tinggi, serta minimnya pelatihan pendampingan berbasis coaching dan mentoring menjadi faktor penghambat optimalisasi peran tersebut.

Selain itu, belum adanya model pendampingan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan menyebabkan dampak pendampingan terhadap peningkatan mutu sekolah dasar belum terlihat signifikan. Pendampingan sering kali belum terintegrasi dengan perencanaan peningkatan mutu sekolah, hasil asesmen nasional, dan program pengembangan profesional guru.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas pendamping pengawas pada satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep supervisi dan pendampingan pendidikan, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan dan strategi peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pengawas sekolah mengalami dan menjalankan peran sebagai pendamping, bukan dari model pengawasan tradisional yang bersifat administratif dan inspeksional menuju peran pendamping profesional (Jelantik, 2018: 24-25). fungsi pengawas sebagai pendamping diantaranya sebagai coach, mentor, fasilitator, dan konsultan dalam mendukung peningkatan kapasitas guru dan manajemen sekolah dasar . Penelitian menelaah sejauh mana perubahan peran tersebut dipahami, diterapkan, dan diterima oleh pengawas maupun pihak sekolah.

Fokus selanjutnya adalah pada model, pendekatan, dan strategi pendampingan yang digunakan pengawas sekolah dalam mendampingi satuan pendidikan. Pendampingan ditelaah dari aspek supervisi akademik, supervisi manajerial, pembinaan profesional guru, serta fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran dan tata kelola sekolah. Penelitian menilai kesesuaian strategi pendampingan dengan kebutuhan nyata sekolah dasar negeri (Glatthorn, Boschee, Whitehead, & Boschee, 2019).

Adapun tingkat efektivitas pendampingan satuan pendidikan oleh pengawas diukur melalui indikator keterlaksanaan pendampingan, intensitas interaksi profesional, perubahan praktik pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta perbaikan manajemen sekolah. Fokus ini menilai hubungan antara pendampingan berkelanjutan dengan peningkatan kualitas proses pendidikan.

Upaya tersebut diwujudkan dalam membangun kualitas pendidikan dikaji dari dimensi mutu pembelajaran, iklim sekolah, kinerja guru, kepemimpinan kepala sekolah, serta capaian hasil belajar siswa. Penelitian menganalisis sejauh mana pendampingan pengawas berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan secara holistik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pendampingan pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan?
2. Bagaimana strategi proses pendampingan pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan?
3. Bagaimana indikator keberhasilan efektifitas pendampingan pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Menggambarkan bentuk pendampingan pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.
2. Menganalisis strategi proses pendampingan pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.
3. Menganalisis indikator keberhasilan efektifitas pendampingan pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini sebagai titik tolak bagi peneliti dalam usaha menambah keilmuan terkait pendampingan satuan pendidikan oleh pengawas sekolah dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dalam bidang manajemen dan mutu pendidikan Sekolah Dasar.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini sebagai bagian dari banyaknya kajian dan penelitian lain yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tentu saja diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran alternatif dan acuan bagi pengawas sekolah dalam merancang perencanaan pendampingan yang lebih sistematis, kontekstual, dan berbasis kebutuhan riil sekolah. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengawas, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten

Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan supervisi akademik dan manajerial, mulai dari penyusunan program kerja, penetapan tujuan pendampingan, hingga penentuan strategi peningkatan mutu sekolah dasar. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penguatan kapasitas pengawas sekolah, penyusunan program pelatihan, serta pengembangan model pendampingan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara terencana dan berkesinambungan.